**EVALUASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA MELALUI KINERJA KEUANGAN BERBASIS *VALUE FOR MONEY***

**DI KOTA MAGELANG**

Jeffry Walter Sinaga

190620266

Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

# ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah terdapat perbedaan antara
sebelum dan sesudah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Kota Magelang.
Jenis penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah Kota Magelang sedangkan sampel dalam penelitian ini yakni
data laporan realisasi anggaran APBD Pemerintah Daerah Kota Magelang. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder yakni Tahun anggaran sebelum
anggaran berbasis kinerja yakni tahun 2004-2008 dan setelah anggaran berbasis
kinerja yakni tahun 2014-2018. Rasio keuangan yang digunakan adalah
berdasarkan value for money yakni rasio ekonomis, efektivitas dan efisiensi.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif dan
uji wicoxon signed rank test karena data tidak seluruhnya berdistribusi normal.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio ekonomis tidak menunjukan perbedaan
sedangkan pada rasio efektifitas dan efisiensi terdapat perbedaan antara sebelum
dan sesudah diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

**Kata Kunci : Anggaran berbasis kinerja, *Value for Money*, APBD**

# PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah saat ini memasuki era penganggaran berbasis kinerja. Namun pada kenyataannya proses penganggaran masih berfokus pada besarnya anggaran padahal semenjak diberlakukannya Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem penganggaran APBD adalah anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang tidak hanya melihat besaran anggaran namun memperhatikan kinerja anggaran yang meliputi capaian kinerja, keluaran, hasil serta manfaat. (Tanzeh, 2011) Sistem penganggaran berbasis kinerja turut dipengaruhi oleh otonomi daerah yakni dalam akuntansi sektor publik. Salah satu pengaruh yang muncul akibat otonomi daerah adalah tuntutan dari masyarakat mengenai akuntabilitas keuangan lembaga publik. Arti penting akuntabilitas terhadap keuangan lembaga publik adalah diketahuinya kemampuan pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien dan efektif *(value for money*). Tingkat ekonomi, efisien dan efektif organisasi pemerintahan dikukur guna mengetahui input, output, serta outcome. (Nordiawan, 2006)

Adapun untuk mengukur kinerja pemerintah berdasarkan anggaran berbasis kinerja bisa dilakukan melalui konsep *Value for Money*. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan mendasarkan kepada tiga elemen yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada konsep *value for money*, ekonomi diukur dengan rasio antara masukan actual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasi (aktual) dengan keluaran menurut rencana. Setelah dikur ketiga elemen tersebut maka dapat diketahui sejauh mana daerah mempunyai kemampuan keuangan untuk pelaksanaan otonomi daerah. *Value for Money* pada konteks ekonomi daerah berarti sebagai sebuah jembatan pengantar pemerintah daerah mencapai sistem pemerintahan yang baik. (Nordiawan, 2006)

*Input* adalah sumber daya masukan untuk menhasilkan output. Indikator input berguna untuk mengukur jumlah sumber daya yakni SDM, dana, material dan lainnya untuk melaksanakan kegiatan. *Output* adalah hasil dari suatu proses. Indikator output menunjukkan hasil implementasi program. Contoh indikator output adalah jumlah pendapatan asli daerah. Sedangkan outcome sendiri yakni dampak dari suatu program kegiatan terhadap masyarakat. Posisi *outcome* nilainya lebih tinggi dari *output* karena *outcome* mengukur kualitas dari output.

Pemerintah Kota Magelang adalah salah satu kota di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki trend perbaikan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada kurun waktu awal awal diterapkannya Anggaran berbasis kinerja Kota Magelang meraih Opini wajar dengan pengecualian (WDP) namun beberapa tahun belakangan Kota Magelang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu menarik untuk dikaji penerapan penganggaran di Kota Magelang mulai dari sebelum diterapkannya anggaran berbasis kinerja dan setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan *value for money.*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* Di Kota Magelang ”

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi pada penganggaran di Pemerintah Kota Magelang sebelum diterapakannya anggaran berbasis kinerja (tahun 2004-2008)?
2. Bagaimana rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi pada penganggaran di Pemerintah Kota Magelang sesudah diterapakannya anggaran berbasis kinerja (tahun 2010-2014)?

**LANDASAN TEORI**

1. **Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sector publik menurut Mardiasmo adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi dari keuangan organisasi yang meliputi informasi tentang pendapatan, belanja, dan aktivitas. Melihat beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran publik adalah rencana finansial yang menyatakan berapa rencana pengeluaran/belanja dan bagaimana memperoleh uang untuk pendapatan. (Mardiasmo, 2009)

Adapun karakteristik anggaran sektor publik adalah (Indra, 2006) :

1. Anggaran dinyatakan ke dalam satuan uang maupun non uang.
2. Anggaran mencakup jangka waktu tertentu.
3. Anggaran tersebut memiliki komitmen dan kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang telah disepakati dan ditetapkan.
4. Usulan anggaran telah dibahas, ditelaah kemudian disetujui oleh pihak berwenang yang lebih lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Anggaran tersebut disusun sekali dan hanya bisa diubah dalam kondisi tertentu.
6. **Keuangan Pemerintah Daerah**

 Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban yang bisa dinilai menggunakan uang baik berupa uang maupun barang yang bias dijadikan kekayaan daerah sepanjang tidak atau belum dimiliki ataupun dikuasai Negara menurut peraturan perundang-undangan. Adapun lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Halim, 2002) Keuangan daerah yang dikelola langsung merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta barang-barang inventaris milik daerah. Perlu analisis terhadap laporan keuangan daerah untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun angggaran. Analisis tersebut bermaksud untuk menjawab berbagai pertanyaan yakni apakah posisi keuangan pemda mengalami penurunan atau peningkatkan disbanding dengan tahun anggaran sebelumnya. (Halim, 2002)

1. **Kinerja**

 Menurut Bastian Kinerja adalah :

“kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”. (Indra, 2006)

Kinerja adalah satu konstruk yang sifatnya multidimensional dimana pengukurannya bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Menurut beberapa ahli bahwa kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil dari kerja itu sendiri (*outcomes of work*). Hasil kerja berhubungan erat dengan tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusi ekonomi. (Indra, 2006)

Menurut Mahmudi pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan berdasarkan sasaran yang telah ditentukan. (Mahmudi, 2011) Menurut Mardiasmo Pengukuran kinerja keuangan pemerintahan daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yakni pertama pengukuran kinerja pemerintahan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah yang berfokus pada sasaran dan tujuan program unit kerja. Pengukuran kinerja penting untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi pemerintahan dalam pelayanan publik. Kedua, pengukuran kinerja berguna untuk pengalokasian sumber daya dalam rangka pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2009)

Hal yang tak kalah penting dalam memahami kinerja adalah mengenai indikator kinerja. Indicator kinerja berfungsi sebagai penilaian suatu organisasi menjalankan program sebelumnya. (Nordiawan, 2006) Adapun definisi dari Indikator kinerja ialah ukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang memperhitungkan beberapa indicator yakni:

1. indikator masukan (*input)*

Input adalah segala yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan yang kemudian menghasilkan keluaran. Input berupa sumber dyaa manusia, waktu, teknologi, manusia dan kebijakan serta lainnya untuk melaksanakan kegiatan.

1. keluaran (*outputs*)

Indikator output merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari kegiatan berupa fisik dan non fisik.

1. hasil (*outcomes*)

Outcomes merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (output) dalam jangka menengah.

1. Indikator manfaat (benefits)

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, sedangkan

1. Indikator dampak (impacts)

Indicator ini adalah merupakan pengaruh yang muncul baik pengaruh secara positif atau negatif pada setiap tingkatan indikator berlandaskan asumsi yang ditetapkan

1. **Anggaran Berbasis Kinerja**

 Anggaran Berbasis Kinerja menurut Kementerian Keuangan (2014)

 adalah “suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja Negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja.”

Kementrian Keuangan (2016) juga menjelaskan mengenai lingkup penganggaran berbasis kinerja yang terbagi menjadi beberapa lingkup yakni:

1. Menentukan visi dan misi, tujuan, sasaran, dan target
2. Menentukan Indikator Kinerja.

Menurut Mahmudi angaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran pada (*input*) dengan keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) yang diharapkan tercapainya efisiensi dalam pencapaian keluaran serta hasil. (Mahmudi, 2011) Selanjutnya Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa Anggaran berbasis kinerja adalah sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang menekankan keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. (Mardiasmo, 2009)

Secara umum dapat diketahui bahwa anggaran berbasis kinerja adalah system penganggaran baru yang ada akibat kelemahan system penganggaran tradisional. Sejalan dengan pendapat Halim dan Kusufi (2014) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja disusun guna mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam anggaran tradisional karena anggaran kinerja menekankan pada konsep *value for money.* (Halim, 2002)

1. **Value For Money**

 *Value for money* menurut Nordiawan adalah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja suatu pemerintah tidak bisa hanya dinilai dari output yang dihasilkan saja, namun juga harus mempertimbangkan indikator input, output, dan outcome secara bersama-sama. (Nordiawan, 2006) Menurut Pendanaan Pendidikan Tinggi Dewan Inggris (HEFCE) University of Cambridge menjelaskan mengenai gambaran nilai uang (*Value for Money*) sebagai istilah yang digunakan untuk menilai mengenai sebuah organisasi apakah telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik dengan melihat sumber daya yang tersedia untuk itu. Adapun tiga elemen utama dari *Value for money* dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Mardiasmo, 2009) Berikut penjelasan masing-masing elemen beserta dengan cara perhitungannya:

1. Elemen ekonomi

Elemen ini merupakan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan input *value* adalah realisasi anggaran. Elemen ini hendak mengukur apakah suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai output sesuai ketetapan. Secara matematis pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$Ekonomi=\frac{Realisasi Penerimaan PAD }{Anggaran Penerimaan PAD} x 100\%$

Adapun Klasifikasinya pengukurannya sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Klasifikasi Indikator Ekonomi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presentase** | **Kriteria** |
| 100 % keatas | Sangat ekonomis |
| 90 %-100% | Ekonomis |
| 80%-90% | Cukup Ekonomis |
| 60%-80% | Kurang Ekonomis |
| Kurang dari 60% | Tidak Ekonomis |

Sumber : Halim, 2002

1. Elemen Efisiensi

Elemen ini adalah perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan. Elemen efektivitas berisi mengenai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan secaea matematis sebagai berikut:

$$Efisiensi=\frac{Biaya Penerimaan PAD }{Realisasi Penerimaan PAD} x 100\%$$

Adapun Klasifikasinya pengukurannya sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Klasifikasi Indikator Efisiensi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presentase** | **Kriteria** |
| 40,01 % keatas | Tidak Efisien |
| 20,01 %-40,00% | Kurang Efisien |
| 20,1 %-30 % | Cukup Efisien |
| 10,01 %- 20 % | Efisien |
| Di bawah 10% | Sangat efisien |

1. Elemen efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak berbicara mengenai besaran biaya yang dikeluarkan guna mencapai tujuan. Organisasi sektor publik bisa dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$Efektifitas=\frac{Realisasi Pendapatan }{Target Pendapatan} x 100\%$$

 Adapun Klasifikasi pengukurannya sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Indikator Efektifitas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presentase** | **Kriteria** |
| 100 % keatas | Sangat efektif |
| 90 %-100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup efektif |
| 60%-80% | Kurang efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak efektif |

Sumber : Halim, 2002

**Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu mengenai analisis value for money telah dilakukan dengan karakteristik yang berbeda sebagaik berikut:

**Tabel Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Penulis  | Judul | Hasil  | Perbedaan |
| Defia Rizky Pane (2017) | Analisis Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015 | Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Medan belum baik dalam menjalankan kinerja keuangan karena berdasarkan rasio ekonomis yang kuraang efisien dan rasio efektifitas yang kurang efektif, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif | Perbedaan penelitian adalah objek penelitian dan juga metode, karena penelitian yang akan penulis lakukan adalah objeknya Kota Magelang sebelum dan sesudah diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja dengan metode kuantitatif |
| Debby Tamara Enre (2020) | Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan | Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan Value for Money mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah, terbukti dengan pendapatan daerah yang tidak mampu mencapai target, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Kota Medan. Rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan belum memenuhi standar berdasarkan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996 | Perbedaan dengan penelitian ini adalah standard yang digunakan adalah kepmendagri Tahun 1996 yang sudah using dan tidak relevan dengan kondisi saat ini, adapun penelitian ini mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 karena penelitian ini akan mengetahui value for money pada anggaran berbasis kinerja yang diterapkannya adalah berbasis UU Keuangan Negara yang diterapkan pasca adanya otonomi daerah atau lebih tepatnya pasca tahun 2006. |
| Ridwan dan Anggrawati (2017) | Konsep Value For Money: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur | Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas PU Luwu Timur kinerjanya sudah memenuhi indikator ekonomis, efisien dan efektif dengan indikator outoput yang terpenuhi 100 persen. | Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah ingin mengetahui evaluasi kinerja yang bukan hanya berdasarkan output namun juga outcome sesuai dengan konsep penganggaran berbasis kinerja. |

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dengan angka mulai dari pengumpulan data, kemudian dilajut dengan penafsiran data untuk kemudian ditampilkan hasilnya. Adapun pengolaan data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik atau matematik. (Mustofa, 2013)

Adapun dalam statistika populasi diartikan sebagai sekumpulan individu yang memiliki karakteristik khas yang kemudian menjadi perhatian dalam penelitian. (Mustofa, 2013) Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kota Magelang. Pemilihan Kota Magelang karena trend perbaikan keuangan daerah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa ringkasan realisasi APBD dan ringkasan anggaran APBD Kota Magelang sebelum dilaksanakannya Anggaran Berbasis Kinerja tahun 2004-2008 setelah dilaksanakannya anggaran berbasis kinerja tahun 2010-2014. teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak dimana informasinya didapatkan melalui pertimbangan tertentu. Elemen populasi yang dijadikan sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan. (Indriantoro, 2014) Dalam penelitian ini pengambilan sampel diambil dengan pertimbangan bahwa tahun 2004-2008 adalah penganggaran yang belum berprinsip anggaran berbasis kinerja dan menuju transisi penerapan Anggaran berbasis kinerja dan juga tahun 2010-2014 sudah diterapkannya anggaran berbasis kinerja

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Definisi | Dimensi |
| Ekonomis | Definisi Ekonomi dalam *value for money* adalah perolehan sumber daya *(input*) pada harga yang terendah. Ekonomi adalah perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter atau merupakan realisasi PAD dengan anggaran PAD. (Indra, 2006) | * Realisasi Penerimaan PAD
* Anggaran Penerimaan PAD
 |
| Efektivitas | Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Efektifitas diukur berlandaskan pada sejauh mana tingkat output, kebijakan dan juga prosedur suatu organisasi mencapai tujuannya. (Indra, 2006)  | * Realisasi Penerimaan PAD
* Target Penerimaan PAD
 |
| Efisiensi | Efisiensi memiliki definisi yakni perbandingan *output/input* yang berkaitan dengan standar kinerja maupun target yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2009) | * Biaya PAD
* Realisasi Penerimaan PAD
 |

Teknik Analisis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan teknik dalam analisis data penelitian ini adalah:

1. Statistik Deskriptif

 Statistik deskriptif menurut Ghozali adalah metode statistik untuk memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), varian, standard deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtois dan juga skwness. (Ghozali, 2011) Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variable yang digunakan dalam penelitian ini untuk nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi secara kontekstual supaya mudah untuk dimengerti.

1. Pengujian Statistik

Pengujian statistik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji normalitas data pada variabel-variabel dalam penelitian ini. Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji model regresi, variabel pengganggu, atau residual apakah memiliki destribusi normal. (Ghozali, 2011)

 Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov test*. Uji ini digunakan guna menguji uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Apabila hasil *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 artinya data residual terdistribusi dengan normal, namun apabila hasil *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai dibawah 0,05 berarti data residual terdistribusi dengan tidak normal. (Ghozali, 2011)Kemudian apabila hasil data tidak seluruhnya berdistribusi normal maka diuji rasio-rasionya menggunakan analisis *wilcoxon signed rank test*. Analisis *wilcoxon signed rank test* digunakan untuk mengevaluasi perlakuan tertentu terhadap dua pengamatan yakni antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan tertentu tersebut.

Adapun dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis menggunakan *paired sample T Test* yang artinya uji yang dipakai guna mengetahui ada maupun tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berpasangan ataupun berhubungan. Dalam uji ini akan diketahui jika secara signifikan pengujian lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Magelang. Namun jika pengujian lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Magelang.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Statistic Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan keadaan atau deskripsi data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standard deviasi, minimum, maksimum dan varian. (Ghazali, 2011: 163). Berikut ini adalah data statistik deskriptif selama periode penelitian:

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

|  |
| --- |
| **Descriptive Statistiks** |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| EkonomisSebelum | 5 | 1.14 | 139.00 | 82.8620 | 50.20460 |
| EkonomisSesudah | 5 | 29.58 | 99.00 | 81.1500 | 29.47289 |
| EfesiensiSebelum | 5 | 9.72 | 106.00 | 77.7360 | 38.84660 |
| EfesiensiSesudah | 5 | 53.38 | 104.00 | 90.3040 | 21.05903 |
| EfektifitasSebelum | 5 | 52.00 | 109.00 | 95.2000 | 24.28374 |
| EfektifitasSesudah | 5 | 1.02 | 103.62 | 72.2160 | 43.97545 |
| Valid N (listwise) | 5 |  |  |  |  |

Sumber : hasil data diolah

Penjelasan Mengenai statistik deskriptif tersebut adalah

1. Ekonomi sebelum Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Rasio ekonomi sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukan nilai minimum sebesar 1.14, nilai maksimum sebesar 139.00 dengan rata rata 82.8620 atau sebesar 83 %, artinya rasio ekonomi sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria cukup ekonomis.

1. Rasio ekonomi setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Rasio ekonomi setelah penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukan nilai minimum sebesar 29.58, nilai maksimum sebesar 99.00 dengan rata rata 81.1500 atau sebesar 81 %, artinya rasio ekonomi setelah penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria cukup ekonomis.

1. Rasio efisiensi sebelum Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Rasio efisiensi sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukan nilai minimum sebesar 9.72, nilai maksimum sebesar 106.00 dengan rata rata 77.7360 atau sebesar 77.73 %, artinya rasio efisiensinya sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria efisien.

1. Rasio efisiensi setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Rasio efisiensi setelah penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukan nilai minimum sebesar 53.38, nilai maksimum sebesar 104.00 dengan rata rata 90.3040 atau sebesar 90.30 %, artinya rasio efisiensinya setelah penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria kurang efisien.

1. Rasio efektivitas sebelum Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Rasio efektivitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukan nilai minimum sebesar 52.00, nilai maksimum sebesar 109.00 dengan rata rata 95.2000 atau sebesar 95.20 %, artinya rasio efektivitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria efektif.

1. Rasio efektivitas setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Rasio efektivitas setelah penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukan nilai minimum sebesar 1.02, nilai maksimum sebesar 103.00 dengan rata rata 72.2160 atau sebesar 72.21 %, artinya rasio efektivitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria efektif.

1. **Pengujian Statistik**

Pengujian statistik dengan uji normalitas data terhadap variabel-variabel yang digunakan. Uji normalitas bertujuan menguji model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki ditribusi normal (Ghozali, 2011: 160). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov test*. Uji ini digunakan guna mengetahui uji statistik mengenai data terdistribusi normal ataupun tidak.

Tabel 4.3

Hasil uji Normalitas

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | EkonomisSebelum | EkonomisSesudah | EfesiensiSebelum | EfesiensiSesudah | EfektifitasSebelum | EfektifitasSesudah |
| N | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 82.8620 | 81.1500 | 77.7940 | 90.3040 | 95.2000 | 72.2160 |
| Std. Deviation | 50.20460 | 29.47289 | 38.86093 | 21.05903 | 24.28374 | 43.97545 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .342 | .332 | .379 | .374 | .426 | .302 |
| Positive | .197 | .272 | .234 | .258 | .285 | .238 |
| Negative | -.342 | -.332 | -.379 | -.374 | -.426 | -.302 |
| Test Statistik | .342 | .332 | .379 | .374 | .426 | .302 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .057c | .074c | .018c | .021c | .003c | .155c |
| a. Calculated from data. |
| b. Lilliefors Significance Correction. |

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas nilai *kolmogorov-smirnov* tidak seluruhya memiliki nilai di atas 0,05, artinya data dianggap tidak seluruhnya berdistribusi normal secara statistik. Sehingga untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja pada data rasio keuangan dengan tingkat signifikan 0.05 dalam penelitian ini akan digunakan *Wilcoxon Signed Rank Test.*

**Tabel 4.4**

**Wilcoxon Signed Ranks Test**

|  |
| --- |
| **Ranks** |
|  | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
| EkonomisSesudah - EkonomisSebelum | Negative Ranks | 3a | 3.00 | 9.00 |
| Positive Ranks | 2b | 3.00 | 6.00 |
| Ties | 0c |  |  |
| Total | 5 |  |  |
| EfesiensiSesudah - EfesiensiSebelum | Negative Ranks | 2d | 2.50 | 5.00 |
| Positive Ranks | 3e | 3.33 | 10.00 |
| Ties | 0f |  |  |
| Total | 5 |  |  |
| EfektifitasSesudah - EfektifitasSebelum | Negative Ranks | 4g | 2.75 | 11.00 |
| Positive Ranks | 1h | 4.00 | 4.00 |
| Ties | 0i |  |  |
| Total | 5 |  |  |

Sumber : data laporan keuangan Kota Magelang diolah

|  |
| --- |
| **Test Statistiksa** |
|  | EkonomisSesudah – EkonomisSebelum | EfesiensiSesudah - EfesiensiSebelum | EfektifitasSesudah - EfektifitasSebelum |
| Z | -.405b | -.674c | -.944b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .686 | .500 | .345 |
| a. Wilcoxon Signed Ranks Test |
| b. Based on positive ranks. |
| c. Based on negative ranks. |

Sumber : data laporan keuangan Kota Magelang diolah

Melihat hasil statistik *Wilcoxon signed rank test* maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hasil analisis *data wilcoxon signed rank test*, rasio ekonomis tidak terdapat perbedaan pada sebelum dan sesudah diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai profitabilitasnya pada nilai yang lebih signifikan yang telah ditetapkan yaitu < 0,05 yaitu sebesar 0,686.
2. Menurut hasil analisis *wilcoxon signed rank test* pada rasio efisiensi menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem anggaran kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang lebih besar dari tingkat segnifikan yang telah ditetapkan α = 0,05 yaitu sebesar 0.500.
3. Menurut hasil analisis *wilcoxon signed rank test* pada rasio efektifitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan α = 0,05 yaitu sebesar 0,345.
4. **Pembahasan Analisis Data**

Berdasarkan uji statistik maka hasil analisis data value for money adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Rasio ekonomi Sebelum dan Sesudah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

 Berdasarkan hasil uji statistik tidak terdapat perbedaan rasio ekonomis sebelum dan sesudah diterapkannya anggaran berbasis kinerja. Hal ini dapat dilihat dari uji *data wilcoxon signed rank test* dimana nilai profitabilitasnya pada nilai yang lebih signifikan yang telah ditetapkan yaitu < 0,05 yaitu sebesar 0,686.

 Tingkat signifikan data tersebut lebih besar dari nilai α 0.05, artinya tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan juga sesudah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomis. Selain itu jika melihat analisis deskriptif pada rasio ekonomis mengalami penurunan semenjak diterapkannya anggaran berbasis kinerja yakni dari 83 % menjadi 81 %. Hal ini menunjukan bahwa semakin menurun nilai ekonomisnya maka semakin rendah pula keekonomisan pada Pemerintah Kota Megalang dalam mengelola keuangannya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rasio ekonomis sebelum dan sesduah diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

 Rasio ekonomis berhubungan erat dengan penghematan sering disebut penghematan yang cakupannya adalah pengelolaan keuangan secara cermat yang tidak ada pemborosan. Rasio ekonomis yang persentasenya besar maka kinerja keuangan semakin baik. (Muhammad,2006:179) Apabila dikaitkan dengan Pemerintah Kota Magelang sebenarnya baik sebelum ataupun sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki rasio ekonomis yang cukup ekonomis. Terlebih jika dilihat dari rasio ekonomis yang mengalami trend peningkatan semenjak diterapkannya anggaran berbasis kinerja yakni dilihat dari persentase rasio ekonomis tahun meskipun tidak setiap tahun 2016 hingga tahun 2018 yang berada di angka 90 %.

1. Perbedaan Rasio efisiensi Sebelum dan Sesudah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut hasil analisis *wilcoxon signed rank test* pada rasio efisiensi menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem anggaran kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang lebih besar dari tingkat segnifikan yang telah ditetapkan α = 0,05 yaitu sebesar 0.500. Jika dilihat dari statistik deskriptif sebelum diterapkannya anggaran berbasis kinerja menunjukkan persentase 77.73 % yang artinya masuk kriteria efisien, namun setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja mengalami kenaikan yakni sebesar 90.30 % yang mana memiliki kriteria kurang efisien.

 Hasil rasio efisiensi yang mengalami penurunan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Havis (2017) dimana setelah diterapkan anggaran berbasis kinerja terdapat penurunan rasio efisiensi. Data kurang efisiennya keuangan daerah Kota Magelang menunjukan bahwa pemerintah Kota Magelang dalam memperhitungkan pengeluaran alokasi belanja daerah belum mampu meningkatkan pendapatan daerah. Melihat data tersebut maka perlunya penetapan target biaya yang sesuai sehingga pengeluaran lebih efisien. Karena berbicara mengenai efisiensi maka berbicara mengenai output tertentu dihasilkan dengan input serendah-rendahnya atau input tertentu dapat menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). (Nordiawan, 2010)

1. Perbedaan Rasio Efektivitas sebelum dan sesudah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

 Menurut hasil analisis *wilcoxon signed rank test* pada rasio efektifitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan α = 0,05 yaitu sebesar 0,345. Sedangkan menurut statistik deskriptif Rasio efektivitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukan nilai minimum sebesar 52.00, nilai maksimum sebesar 109.00 dengan rata rata 95.2000 atau sebesar 95.20 %, artinya rasio efektivitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria efektif. Kemudian setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja menunjukan nilai minimum sebesar 1.02, nilai maksimum sebesar 103.00 dengan rata rata 72.2160 atau sebesar 72.21 %, artinya rasio efektivitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria efektif.

 Melihat data statistik tersebut menunjukan bahwa sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja rasio efektivitas berada pada kriteria efektif namun setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja rasio tersebut mengalami penurunan dari 95.20 % menjadi 72.21 %.

 Keuangan daerah dikatakan efektif apabila tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan input dengan output. (Mardiasmo, 2002: 4). Melihat data keuangan ini maka Pemerintah Kota Magelang harus mempertahankan pencapaian ini dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah kedepannya karena anggaran yang efektif menunjukkan kesuksesan pencapaian tujuan kegiatan.

# PENUTUP

1. **KESIMPULAN**

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan daerah Kota Magelang sebelum dan sesudah diterapkannya anggaran berbasis kinerja menggunakan pendekatan *value for money*. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji wilcoxon signed rank, dapat diperoleh kesimpulan yakni:

1. Sebelum anggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomis menunjukan sebesar rasio 83 % yang artinya cukup ekonomis. Pada rasio efisiensi sebesar 77.73 %, artinya efisien, dan pada rasio efektivitas sebesar 52.00 % yang artinya efektif.
2. Setelah anggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomis menunjukan sebesar rasio 81 % yang artinya cukup ekonomis. Pada rasio efisiensi sebesar 90.30 %, artinya kurang efisien, dan pada rasio efektivitas sebesar 72.00 % yang artinya efektif.
3. Berdasarkan olah data statistik menunjukan bahwa rasio ekonomis tidak terdapat perbedaan rasio ekonomis sebelum dan sesudah diterapkannya anggaran berbasis kinerja. Sedangkan pada rasio efisiensi dan efektifitas terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah penganggaran berbasis kinerja.
4. **KETERBATASAN**
5. Penelitian ini belum memasukan rasio lain seperti Pertumbuhan PAD, desentralisasi dan rasio keuangan daerah lain.
6. Penelitian ini dilaksanakan ketika pandemi covid-19 sehingga tidak diperkenankan penelitian lapangan di Pemerintah Kota Magelang sehingga sifat penelitian ini hanya penelitian kuantitatif.
7. **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa saran yakni

1. Saran untuk pemerintah Kota Magelang yakni untuk dapat memperhatikan penggunaan APBD supaya maksud dari adanya penganggaran berbasis kinerja dapat terlaksana yakni penganggaran yang sesuai dengan program kerja kegiatan yang berorientasi pada *outcome* yang tentunya ekonomis, efisien dan efektif.
2. Bagi Masyarakat Kota Magelang

Agar terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah rasio keuangan daerah lain supaya hasil penelitian lebih komprehensif seperti pertumbuhan PAD, kemampuan desentralisasi dan lainnya dan juga melakukan studi lapangan untuk mengetahui kendala apa yang menyebabkan anggaran berbasis kinerja tidak terlaksana dengan baik, karena penelitian ini hanya penelitian kuantitatif.

# DAFTAR PUSTAKA

Agustina, H. Z. (2020). *Analisis Pengaruh Intelectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan dengan Competitive Advantage Sebagai Variabel Intervening.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Asri, N. N. (2017). *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Pendekatan Value For Money Dan Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Surakarta: IAIN Surakarta.

Enre, D. T. (2020). *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan.* Medan: UIN Medan.

Ghozali, I. ,. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Ketiga.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah (Ed. Ke-1).* Jakarta: Salemba Empat.

Indra, B. I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga.

Indriantoro, N. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12.* Yogyakarta: BPFE.

Mahmudi. (2011). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Margaretha, F. (2015). Dampak Electronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 514-524.

Mulyadi. (2003). *Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Nordiawan. (2006). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Nugrahani, T. A. (2014). Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akmenika Vol. 1 No. 1*, 10-17.

Suprapto. (2006). *Analisis KinerjaKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Suyono. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* Surakarta: UNS.

Yuwono, S. (2005). *Penganggaran Sektor Publik.* Surabaya: Bayumedia Publising.